



FRAKSI PKB
DPRD KOTA SALATIGA

PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB DPRD KOTA SALATIGA

TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD TAHUN 2026

SALATIGA, 12 NOVEMBER 2025



Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Salatiga Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang terhormat,
Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kota Salatiga,
Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga beserta jajaran Forkopimda,
Serta hadirin yang berbahagia.

Pendahuluan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas kesempatan kita bermusyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026.

RAPBD adalah instrumen utama pembangunan daerah, mencerminkan arah kebijakan fiskal, keberpihakan sosial, dan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PKB memandang bahwa RAPBD 2026 dengan **total pendapatan sebesar Rp864,79 miliar dan total belanja Rp890,79 miliar**, sehingga terjadi **defisit sebesar Rp26 miliar** yang ditutup dengan **pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya**, menunjukkan postur anggaran yang **masih konservatif dan reaktif**, belum sepenuhnya progresif dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Analisis Umum RAPBD 2026

1. Struktur Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar **Rp324,86 miliar** atau sekitar **37,6% dari total pendapatan**, dengan komponen terbesar berasal dari **pajak daerah (Rp111,82 miliar)** dan **retribusi daerah (Rp179,03 miliar)**. Fraksi PKB menilai:

- Target PAD ini **cukup ambisius**, namun peningkatannya **belum disertai strategi inovatif**, misalnya penguatan digitalisasi pajak daerah atau optimalisasi aset nonproduktif.
- Komponen **hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Rp24,86 miliar)** masih didominasi dividen BUMD. Kami mendorong agar BUMD tidak sekadar mengejar profit, tetapi juga menjalankan **fungsi sosial-ekonomi** sesuai nilai-nilai *khidmah* terhadap masyarakat.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah mencapai **Rp890,79 miliar**, dengan komposisi:

- **Belanja operasi**: Rp828,69 miliar (93%)
- **Belanja modal**: Rp59,1 miliar (6,6%)
- **Belanja tidak terduga**: Rp3 miliar (0,3%)

Fraksi PKB menyoroti:

- Proporsi **belanja operasi yang sangat dominan** menunjukkan orientasi birokratik yang tinggi, sementara **alokasi untuk belanja modal dan infrastruktur publik masih rendah**.
- Keseimbangan antara **belanja pegawai (Rp434,8 miliar)** dan **belanja publik langsung** belum proporsional terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi masyarakat.
- Kami menilai masih terdapat potensi **inefisiensi pada belanja barang dan jasa**, terutama pada komponen honorarium, kegiatan seremonial, dan pengadaan yang bersifat rutin.

3. Belanja Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Fraksi PKB mencatat bahwa **belanja bantuan sosial hanya Rp254,5 juta**, angka yang **sangat kecil** dibanding kebutuhan riil masyarakat pascapandemi dan dinamika ekonomi global.

Kami mendesak agar Pemerintah Kota:

- Meningkatkan **alokasi untuk perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, dan ketahanan pangan rumah tangga**,
- Memperkuat **program padat karya dan pemberdayaan ekonomi perempuan**,
- Memperluas **akses pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis yang bermartabat** melalui skema pembiayaan yang lebih inklusif.

4. Kinerja Fiskal dan Pembiayaan

Defisit sebesar Rp26 miliar yang ditutup dengan SILPA menunjukkan **pola penganggaran yang hati-hati**, tetapi juga mengindikasikan **masih rendahnya kapasitas perencanaan dan penyerapan anggaran di tahun-tahun sebelumnya**. Fraksi PKB mendorong agar Pemerintah Kota melakukan:

- **Evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi pelaksanaan APBD 2025**,
- **Reformasi manajemen keuangan daerah** dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Catatan dan Rekomendasi Fraksi PKB

1. Mengapresiasi kinerja pemerintah kota salatiga pada tahun anggaran 2025 yang sudah dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Mendorong kepada eksekutif dan legislative untuk selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat kota salatiga pada tahun anggaran 2026 yang akan di sah kan.
3. Mendorong kepada pihak - pihak OPD untuk lebih memberdayakan ekonomi di semua sektor, dalam melaksanakan anggaran 2026. karena kita tahu atas dasar penurunan TKD pada tahun anggaran 2026 merupakan tantangan yang berat bagi pemerintah daerah kota salatiga. jangan jadikan alasan dalam situasi seperti ini untuk tidak memberdayakan masyarakat kota salatiga.
4. Merekomendasikan kepada OPD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam rangka menumbuh gerakkan ekonomi di kota salatiga, khususnya bagi masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan.
5. Mendorong kepada pemerintah daerah untuk mengawal betul jalannya program – program dari pemerintah pusat terkait koperasi merah putih dan MBG. Dampingi dan beri masukan kepada KMP yang ada di kelurahan – kelurahan se kota salatiga untuk mempunyai visi dan misi bersama mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. beri masukan kepada SPPG untuk memberdayakan UMKM - UMKM yang ada di sekitar SPPG.

6. Pemerintah perlu memperluas **basis pendapatan daerah** melalui:
- Digitalisasi sistem pajak dan retribusi,
 - Pemetaan potensi PAD berbasis wilayah dan sektor,
 - Optimalisasi kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat.
7. **Belanja modal harus ditingkatkan** agar berdampak langsung pada peningkatan ekonomi lokal dan pelayanan publik.
8. Fraksi PKB menekankan pentingnya **keadilan fiskal**, yakni memastikan setiap rupiah APBD membawa manfaat nyata bagi masyarakat kecil, petani, pedagang pasar, pekerja informal, dan generasi muda Salatiga.
9. Dalam semangat “*membangun dari bawah, untuk semua*”, Fraksi PKB mendorong agar RAPBD 2026 menjadi instrumen **pemerataan pembangunan**, bukan hanya pemenuhan target administratif.
10. Selanjutnya “Fraksi PKB mengapresiasi Pemerintah Kota dan DPRD Salatiga yang telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren. Namun demikian, kami memandang perlu segera diterbitkan Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksana, agar semangat perda tersebut benar-benar dirasakan oleh pesantren, santri, dan masyarakat.” “Perda ini baru menjadi ‘ruh’ tanpa tubuh. Perwali adalah ruh yang diberi kaki agar bisa berjalan membawa manfaat bagi masyarakat pesantren di Salatiga.”

Agar Perwali memuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fasilitasi pesantren, Agar Pemkot melibatkan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), MUI, dan Kemenag dalam penyusunannya.

Penutup

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Salatiga menyatakan **menerima dengan catatan** Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut pada tahap berikutnya.

Kami berharap hasil pembahasan nanti benar-benar menghasilkan **APBD yang berpihak pada rakyat**, memperkuat daya tahan ekonomi daerah, dan menegakkan nilai-nilai *amanah* serta *keadilan sosial* sebagaimana cita-cita semangat kebangsaan kita.

***Wallahul Muwafiq Illa Aqwamitthorik
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Salatiga, 12 November 2025

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Ketua : **Ahmad Musadad**

Wk. Ketua : **H. Basirin**

Sekretaris : **Eko Purnomo**

Anggota : 1. **Saiful Mashud, S.Sos.I**

2. **M. Miftah, SE**



Handwritten signatures of the members of the Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Salatiga, corresponding to the list of names provided on the left.